

**PANGKALAN PENGAWASAN
SDKP JAKARTA**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemangku kepentingan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Jakarta, 19 Januari 2024
Kepala,

Akhmadon

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan Laporan Keuangan	5
Catatan atas Laporan Keuangan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	32
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	44
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	59
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	66
F. Pengungkapan Penting Lainnya	70

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA
JALAN MUARA BARU UJUNG, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
TELEPON/FAXIMILE 021-6614712

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagai mana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 19 Januari 2024
Kepala,

Akhmadon
NIP.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta periode 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.885.331.943 dari target senilai Rp1.485.847.000. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp40.916.782.363 atau mencapai 99% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp41.039.008.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada semester I. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 98.404.051.395 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp364.667.025 Aset Tetap sebesar Rp98.404.051.395 jumlah Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0 Nilai Kewajiban sebesar Rp37.040.768 dan Ekuitas Sebesar Rp 98.731.677.652

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.842.442.279 berasal dari pendapatan negara bukan pajak,

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar RP 40.486.728.892 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(37.644.286.613) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa senilai Rp(37.761.873.931) Surplus/Defisit LO senilai Rp (37.761.873.931)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 98.622.899.407 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(37.761.873.931). Transaksi Antar Entitas sebesar Rp38.061.137.428. Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar RP 108.778.245 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp98.731.677.652.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT ATA	31 Desember 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.485.847.000	2.885.331.943	194,19	511.777.593
JUMLAH PENDAPATAN		1.485.847.000	2.885.331.943	194,19	511.777.593
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	12.068.447.000	11.964.332.129	99,14	34.504.740.960
Belanja Barang	B.4	27.581.569.000	27.563.524.531	99,93	18.340.396.089
Belanja Modal	B.5	1.388.992.000	1.388.925.703	100,00	5.158.758.099
Belanja Bantuan Sosial	B.6		-		
JUMLAH BELANJA		41.039.008.000	40.916.782.363	99,70	58.003.895.148

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.5	-	-
Persediaan	C.6	364.667.025	282.359.936
Jumlah Aset Lancar		364.667.025	282.359.936
ASET TETAP			
Tanah	C.7	71.342.761.000	71.612.538.900
Peralatan dan Mesin	C.8	36.145.118.653	41.082.183.764
Gedung dan Bangunan	C.9	20.238.625.975	19.983.037.374
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.10	2.310.645.569	2.310.645.569
Aset Tetap Lainnya	C.11	323.649.040	418.520.040
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.12	31.401.400	31.401.400
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.13	(31.988.150.242)	(37.193.254.394)
JUMLAH ASET TETAP		98.404.051.395	98.245.072.653
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.14	-	-
Aset Lain-Lain	C.15	-	171.834.601
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.16	-	(20.739.447)
JUMLAH ASET LAINNYA	C.17	-	151.095.154
JUMLAH ASET		98.768.718.420	98.678.527.743
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.18	37.040.768	55.628.336
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.19	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.20	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.21	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		37.040.768	55.628.336
JUMLAH KEWAJIBAN		37.040.768	55.628.336
EKUITAS			
Ekuitas	C.22	98.731.677.652	98.622.899.407
JUMLAH EKUITAS		98.731.677.652	98.622.899.407
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		98.768.718.420	98.678.527.743

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN		31 Desember 2023	31 Desember 2022
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	2.842.442.279	508.032.960
JUMLAH PENDAPATAN		2.842.442.279	508.032.960
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	11.964.332.129	11.004.005.022
Beban Persediaan	D.3	359.498.505	280.304.010
Beban Barang dan Jasa	D.4	17.760.610.008	12.832.940.761
Beban Pemeliharaan	D.5	5.405.746.115	2.776.833.297
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.936.775.246	2.685.806.495
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.059.766.889	3.654.285.098
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8		
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	D.9	40.486.728.892	33.234.174.683
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.11	(37.644.286.613)	(32.726.141.723)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		(117.587.318)	(95.658.676)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	42.889.664	2.694.444
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	160.476.982	98.353.120
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.14	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.15	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.16	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	1.013.189
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.18	(117.587.318)	(94.645.487)
DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(37.761.873.931)	(32.820.787.210)
POS LUAR BIASA	D.20		-
Beban Luar Biasa	D.21	-	-
POS LUAR BIASA	D.22	-	-
(DEFISIT) - LO	D.23	(37.761.873.931)	(32.820.787.210)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ATATAI	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1	98.622.899.407	97.423.865.015
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(37.761.873.931)	32.820.787.210
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(190.485.252)	(40.399.815)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	(190.485.252)	(40.400.000)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	185
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	38.061.137.428	34.060.221.417
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	108.778.245	1.199.034.392
EKUITAS AKHIR	E.6	98.731.677.652	98.622.899.407

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

A.Profil dan Kebijakan Teknis Pengawasan SDKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 3 pilar utama dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Pencapaian ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui misi Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Ketiga misi tersebut dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang integral. Pilar kesejahteraan hanya bisa tercapai apabila pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Penjabaran ketiga misi tersebut dituangkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP yang diberikan tugas dan fungsi melaksanakan misi Kedaulatan yakni dengan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2021-2024.

*Visi dan
Misi KKP*

Visi KKP 2021-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2021-2024 maka ditetapkan **Visi Direktorat Jenderal PSDKP 2021-2024, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan**

efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Misi KKP 2021-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2021-2024 maka ditetapkan Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2021-2024, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup

Ditjen. PSDKP.

*Tujuan,
Sasaran
Strategis
dan
Indikator
Kinerja*

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran dari Visi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2021-2024 yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis berikut indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan bagian dari rumusan Tujuan pada Renstra KKP tahun 2021-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui pencapaian Sasaran Strategis Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2021 menjadi 63,87 pada tahun 2024. Ditjen. PSDKP mendukung secara tidak langsung terhadap pencapaian IKU IKMKP melalui kontribusi data Kelompok Masyarakat Pengawasa (Pokmaswas) yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP sebagai salah satu komponen pendukung pada formula perhitungan IKMKP, terutama pada aspek sosial-kelembagaan.
- 2) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pencapaian beberapa Sasaran Strategis, diantaranya:

- a. Tata kelola SDKP bertanggung jawab dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 94% pada tahun 2021 menjadi 98% pada tahun 2024;
 - b. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif dengan indikator kinerja:
 - i. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2021 menjadi 75% pada tahun 2024; dan
 - ii. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan target 93% dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui pencapaian Sasaran Strategis Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja berikut ini:
- a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2021 menjadi 85 pada tahun 2024; dan
 - b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2021 menjadi 90 pada tahun 2024.

*Profil
Pangkalan
PSDKP
Jakarta*

Pangkalan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan Jakarta didirikan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta merupakan pendukung implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta diharapkan kualitas laporan K/L dapat dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 69/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 yaitu susunan Organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2021 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

*Struktur
Organisasi
Lingkup
Pangkalan
PSDKP
Jakarta*

Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 yaitu susunan Organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/202 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas

Kelompok Jabatan Fungsional adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini.



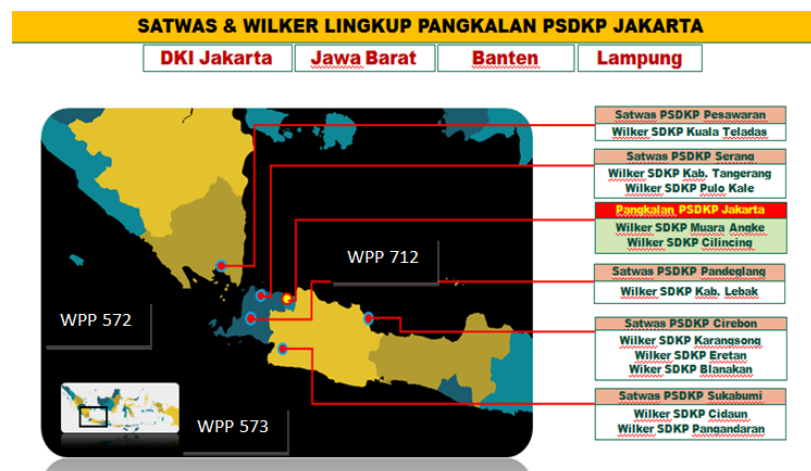
Gambar 1. Struktur Organisasi Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

1.5 Wilayah Kerja

*Wilayah
Kerja
Lingkup
PSDKP
Jakarta*

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Pangkalan PSDKP Jakarta, merupakan fishing ground yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati, selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang di kawal ke Pangkalan PSDKP Jakarta dari perairan ZEEI Samudera Hindia dan Perairan Laut Utara Jawa tersebar di satwas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, ditampilkan peta sebaran satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mulai dari selatan Pulau Sumatera sampai Jakarta. Ditunjukkan pula mengenai sebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu WPP 712 mencakup Perairan Utara Jawa, WPP 572 meliputi Perairan Samudera Hindia Barat Sumatera dan WPP 573 Perairan Samudera Hindia Selatan Jawa.



Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta membawahi 5 Satuan Pengawasan. Satuan Pengawasan PSDKP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	Kab. Administratif Kep. Seribu, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat.
2	Satwas SDKP Pandeglang	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
No	Lokasi	Wilayah Kerja
3	Satwas SDKP Pesawaran	Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji, Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Pesisir Barat
4	Satwas SDKP Cirebon	Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon
5	Satwas SDKP Sukabumi	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kota Pangandaran
6	Satwas SDKP Serang	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota

		Tangerang Selatan
--	--	-------------------

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan fishing ground yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan, Pangkalan PSDKP Jakarta juga melaksanakan pengawasan di bidang kelautan, budidaya, pengolahan dan distribusi hasil perikanan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis

Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta menerapkan basis

Akuntansi

akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam

mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta adalah sebagai berikut:

| Pendapatan- LRA

Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

| Pendapatan- LO

Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

| Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

| Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

| Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset

Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh

tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan metode *First In First Out (FIFO)*. Persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Dengan demikian, seluruh transaksi persediaan harus dicatat secara berurutan sesuai tanggal terjadinya transaksi. Untuk itu, satker agar melakukan perekaman transaksi persediaan pada Tahun Anggaran Berjalan (TAB) setelah laporan keuangan Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) audited selesai disusun, untuk memperoleh saldo awal persediaan yang valid. Dalam hal terdapat transaksi persediaan yang terjadi pada TAB sebelum laporan keuangan TAYL audited selesai disusun, satker agar menatausahakan seluruh dokumen sumber sebelum dapat merekam transaksi tersebut ke dalam Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SAKTI.
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Berdasarkan kesepakatan tripartit antara Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian dituangkan kedalam Surat Edaran Sekertaris Direktorat Jenderal PSDKP No.14211/PSDKP.0.4.2/TU.442/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 untuk mengkoreksi kurang bahan baku (BBM dan Minyak Pelumas)

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik	4 tahun

Modern)	
---------	--

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara

umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

| **Ekuitas**

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2023, Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor SP DIPA-032.05.2.440816/2023 tanggal 30 November 2022 kode *Digital Stamp 0746-4368-9190-0184* dengan total pagu anggaran senilai Rp 41.271.121.000 (*Empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*). Selama waktu berjalan hingga periode pelaporan 31 Desember 2023, Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta, telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta telah melakukan revisi DIPA sebanyak tujuh belas kali. Berikut daftar revisi Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta:

1. Revisi ke 1 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi ini diajukan untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor: B. 6142/PSDKP.1/RC.420/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022, perihal Perubahan Automatic Adjustment Ditjen PSDKP Tahun 2023. Adapun nilai anggaran yang dilakukan Automatic Adjustment sebesar Rp 1.843.324.000. Revisi anggaran disahkan melalui surat nomor: S-1014/AG/AG.3/2022, tanggal 27 Desember 2022.

2. Revisi ke 2 merupakan revisi yang diajukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi anggaran berupa perubahan rencana penarikan dana (Perubahan halaman III DIPA) yang diajukan melalui surat usulan revisi anggaran Nomor: B.416/PSDKPLAN.3/RC.420/II/2023, tanggal 13 Februari 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-995/WPB.12/2023 , tanggal 14 Februari 2023.
3. Revisi ke 3 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi anggaran berupa penghapusan atau buka blokir anggaran, khususnya anggaran pengadaan kendaraan dinas fungsional roda 4 dan roda 2. Usulan revisi anggaran diajukan melalui surat nomor: B.64/DJPSDKP/RC.420/II/2023, tanggal 6 Februari 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-85/AG/AG.3/2023, tanggal 21 Februari 2023.
4. Revisi ke 4 merupakan revisi yang diajukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi anggaran berupa perubahan rencana penarikan dana (Perubahan halaman III DIPA) yang diajukan melalui surat usulan revisi anggaran Nomor: B.1171 /PSDKPLAN.3/RC.420/IV/2023, tanggal 11 April 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-2405/WPB.12/2023, tanggal 12 April 2023.
5. Revisi ke 5 merupakan revisi yang diajukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi anggaran berupa perubahan rencana penarikan dana (Perubahan halaman III DIPA) yang diajukan melalui surat usulan revisi anggaran Nomor: B.2237/PSDKPLAN.3/RC.420/VII/2023, tanggal 4 Juli 2023 dan disahkan melalui surat nomor:

S-3959/WPB.12/2023 , tanggal 6 Juli 2023.

6. Revisi 6 merupakan revisi anggaran yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi ini dilakukan dengan mekanisme revisi anggaran antar KRO, dimana terjadi pengurangan anggaran pada KRO 2350.RCG (Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup) sebesar Rp 52.780.000 untuk dilakukan pergeseran anggaran ke KRO 2350.QDD (Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat). Revisi ini juga sekaligus menghilangkan anggaran yang sudah terblokir pada KRO 2350.RCG (Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup) sebesar Rp 443.324.000 dari pagu Satker Pangkalan PSDKP Jakarta. Usulan revisi anggaran diajukan melalui surat nomor: B.681/DJPSDKP/RC.420/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-392/AG/AG.3/2023, tanggal 18 Juli 2023.
7. Revisi ke 7 merupakan revisi yang diajukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi anggaran berupa perubahan rencana penarikan dana (Perubahan halaman III DIPA) yang diajukan melalui surat usulan revisi anggaran Nomor: B.2763/PSDKPLAN.3/RC.420/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-5289/WPB.12/2023 , tanggal 16 Agustus 2023.
8. Revisi 8 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran (Dit PA). Revisi anggaran berupa penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 739.191.000 yang digunakan untuk mengakomodir penggajian pegawai PPPK tahun anggaran 2023. Revisi

diajukan melalui surat nomor: B.789/DJPSDKP/RC.420/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-284/PB.2/2023, tanggal 29 Agustus 2023.

9. Revisi 9 merupakan revisi yang diajukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi anggaran berupa perubahan rencana penarikan dana (Perubahan halaman III DIPA) yang diajukan melalui surat usulan revisi anggaran Nomor: B.3120/PSDKPLAN.3/RC.420/ IX/2023, tanggal 06 September 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-5562/WPB.12/2023, tanggal 7 September 2023.
10. Revisi 10 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi ini berupa revisi penambahan anggaran sebesar Rp 583.390.000 pada KRO 2350.QDD (Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat). Revisi diajukan melalui surat usulan revisi anggaran Nomor: B.969/DJPSDKP/RC.420/X/2023, tanggal 5 Oktober 2023 dan disahkan melalui surat Nomor: S-627/AG/AG.3/2023, tanggal 15 Oktober 2023.
11. Revisi 11 merupakan revisi yang diajukan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran ini dalam rangka penghapusan blokir anggaran AA (automatic adjustment), sehingga terjadi pengurangan pagu anggaran sebesar Rp 1.400.000.000, dari semula Rp 42.150.378.000 menjadi Rp 40.750.378.000. Revisi diajukan melalui surat usulan revisi anggaran Nomor: B.994/DJPSDKP/RC.420/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dan disahkan melalui surat Nomor: S-

661/AG/AG.3/2023, tanggal 19 Oktober 2023.

12. Revisi 12 merupakan revisi anggaran yang diajukan melalui Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi yang dilakukan berupa pergeseran antar jenis belanja dari belanja pegawai (belanja 51) ke belanja operasional perkantoran (belanja 52) sebesar Rp 555.835.000. Revisi diajukan melalui surat usulan revisi anggaran Nomor B.1007/DJPSDKP/RC.420/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023 dan disahkan melalui surat Nomor: S-367/PB.2/2023, tanggal 27 Oktober 2023.
13. Revisi 13 merupakan revisi anggaran yang diajukan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi yang dilakukan merupakan revisi dalam rangka penambahan anggaran sebesar Rp 500.000.000 pada RO 2350.QHD.001 (Operasi Kapal Pengawas) dari semula Rp 10.492.988.000 menjadi Rp 10.992.988.000. Selain itu dilakukan revisi output pada RO dimaksud berupa pengurangan output sebanyak 1 hari operasi dari semula 115 operasi menjadi 114 operasi. Revisi anggaran juga dilakukan dengan mengurangi anggaran pada KRO 2350.QDD, khususnya pada RO 2350.QDD.001 (Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP) sebesar Rp 211.370.000, dari semula Rp 1.611.170.000 menjadi Rp 1.399.800.000. Revisi diajukan melalui surat Nomor: B.1031/DJPSDKP/RC.420/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023 dan disahkan melalui surat Nomor: S-748/AG/AG.3/2023, tanggal 1 November 2023.
14. Revisi 14 merupakan revisi anggaran yang diusulkan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi anggaran berupa revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA. Mekanisme revisi berupa revisi anggaran antar KRO dari KRO Layanan Manajemen SDM sebesar Rp 28.262.000 serta KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp 33.806.000 guna memenuhi kebutuhan anggaran pada KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp 62.068.000. Revisi diajukan melalui surat Nomor: B.4143/PSDKPLAN.3/RC.420/XI/2023, tanggal 8 November 2023 dan disahkan melalui surat Nomor: S-7362/WPB.12/2023, tanggal 10 November 2023.

15. Revisi 15 merupakan revisi anggaran yang diusulkan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi anggaran berupa revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA. Mekanisme revisi berupa revisi anggaran antar KRO dari KRO Layanan Manajemen SDM sebesar Rp 3.833.000 serta KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp 4.857.000 untuk memenuhi kebutuhan pada KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp 8.690.000. Revisi diajukan melalui surat Nomor: B.4489/PSDKPLAN.3/RC.420/XI/2023, tanggal 29 November 2023 dan disahkan melalui surat Nomor: S-8205/WPB.12/2023, tanggal 30 November 2023.
16. Revisi 16 merupakan revisi anggaran yang diajukan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta berupa revisi dalam rangka permintaan pemutakhiran data petunjuk

operasional kegiatan (POK). Revisi diajukan melalui surat Nomor: B.4768/PSDKPLAN.3/RC.420/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023.

17. Revisi 17 merupakan revisi anggaran yang diajukan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi anggaran berupa revisi administrasi dan revisi perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA. Revisi diajukan melalui surat Nomor: B.4811/PSDKPLAN.3/RC.420/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023 dan disahkan pada tanggal 28 Desember 2023.

Pengurangan anggaran semula-menjadi UPT Pangkalan PSDKP Jakarta TA.2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	DIPA 2023	
	DIPA	DIPA
	SEMULA / AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.485.847.000	1.485.847.000
		-
Jumlah Pendapatan	1.485.847.000	1.485.847.000
Belanja		
Belanja Pegawai	11.885.091.000	12.068.447.000
Belanja Barang	27.810.223.000	27.581.569.000
Belanja Modal	1.575.807.000	1.388.992.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	41.271.121.000	41.039.008.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31
Pendapatan Desember 2023 adalah sebesar Rp2.885.331.943 dan
Rp2.885.331.943 pendapatan pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar
 Rp511.777.593 Pendapatan Pangkalan Pengawasan SDKP
 Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.885.331.943	511.777.593	463,79
Jumlah	2.885.331.943	511.777.593	100%

Terdapat penerimaan negara bukan pajak dari akun 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp42.889.664 yang terdiri dari:

1. Lelang satu paket barang inventaris kantor dengan keadaan rusak berat dan kondisi apa adanya dengan nomor risalah lelang Nomor 817/26/2023 tanggal 18 September 2023 senilai Rp9.700.777;
2. Lelang 1 (satu) unit BMN berupa inflatable life craft tipe rubber boat dalam bentuk limbah padat/ scrap besi kondisi apa adanya dengan nomor risalah lelang 1028/26/2023 tanggal 1 November 2023 senilai Rp21.188.888;
3. Lelang satu paket barang inventaris kantor dengan keadaan rusak berat dan kondisi apa adanya dengan nomor risalah lelang 1122/26/2023 tanggal 20 November 2023 senilai Rp11.999.999.

Pendapatan lainnya berasal dari akun 425839 Pendapatan Denda Lainnya senilai 2.842.442.279. Berikut rincian PNBP yang berasal dari akun Pendapatan Denda Lainnya yaitu pengenaan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Jakarta sampai dengan 31 Desember 2023:

Rincian PNBP s.d. September 2023

No	NAMA WAJIB BAYAR	JENIS PNBP	NTPN	TANGGAL BAYAR	SETORAN PER AKUN (Rp)
1	Agus Triantoro (KM. Barges)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	0A9C9 7QLUF GC5I06	14 Februari 2023	133.747.200
2	Casmito (KM. Luhur Barokah 1)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	303612 G4VG5 H2OJE	31 Maret 2023	100.723.200

3	PT. Satya Trinadi Komira Perkasa	Denda Administratif (Batang Tubuh)	DA7C97QLUF M3LKF C	06 April 2023	326.762.000
4	PT. Rubelli Indonesi	Denda Administratif (Batang Tubuh)	533FD7QLUF M3LL4 U	06 April 2023	513.418.000
5	Koperasi Mina Rizki Abadi (KOMIRA)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	A92270N9VR 30DPL 2	06 April 2023	25.669.000
6	PT. Rukun Artha Sentosa	Denda Administratif (Batang Tubuh)	98A007QLUF M3M3 DQ	11 April 2023	51.413.380
7	PT. Mina Lana Sentosa	Denda Administratif (Batang Tubuh)	112E861QUQH AS108	11 April 2023	53.297.640
8	PT. Aceh Bahari Nusantara	Denda Administratif (Batang Tubuh)	9F5862G4VG7 P8292	11 April 2023	38.223.560
9	KM. Langsung Jaya Maritim (Suryanto)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	D9EB13CIFAQ GCUCB	18 April 2023	12.810.560
10	PT. Tri Anugerah Pasifik (KM. Merpati VII)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	774981JNFLM 1J361	02 Mei 2023	42.530.440
11	KM. Bintang Laju Lestari - 1 (ROBIN)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	7063A2G4VG AKPUM C	08 Mei 2023	50.605.840
12	KM. Sumber Makmur (Ko Kim Hong)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	C402855DF05 2LM01	13 Juni 2023	10.000.000
13	KM. Banyu Urip Makmur - 88 (GT.128) Eddy Karso	Denda Administratif (Batang Tubuh)	F568655DF05 5TCLP	15 Juni 2023	34.455.040
14	KM. Bintang Samudra Perkasa (GT.140) Wibowo Karso	Denda Administratif (Batang Tubuh)	1B1481JNFLR K9EO3	15 Juni 2023	37.685.200
15	KM. Eka Jaya Makmur 9 (GT.196) PT. Eka Jaya International	Denda Administratif (Batang Tubuh)	89B402G4VG E0MN1 S	19 Juni 2023	52.759.280
16	KM. Suman Jaya Perkasa - XII (GT.157) PT. Suman Karya Persada	Denda Administratif (Batang Tubuh)	97F597QLUFS B4TRI	20 Juni 2023	42.261.260
17	KM. Suman Jaya Perkasa - XI (GT.147) PT. Suman Karya Persada	Denda Administratif (Batang Tubuh)	E532148VV5IP GPT6	20 Juni 2023	39.569.460

18	KM. Cahaya Budi Makmur F-112(GT.238) PT. Cahaya Budi Makmur Indonesia	Denda Administratif (Batang Tubuh)	FE6363 CIFB0K QBIR	25 Juni 2023	51.951.740
19	KM. Cahaya Budi Express (GT.238) PT. Cahaya Budi Makmur	Denda Administratif (Batang Tubuh)	CA280 55DF0 5DKCR H	25 Juni 2023	64.064.840
20	PT. Cenhong Fisherindo	Denda Administratif (Batang Tubuh)	23FE01 JNFM1 4VO2J	01 Agustus 2023	212.800.000
21	PT. Berkah Bahari Mina Makmur	Denda Administratif (Batang Tubuh)	50B4C 7QLUF VBUEO K	18 Juli 2023	106.400.000
22	CV. Sumber Rejeki Jaya	Denda Administratif (Batang Tubuh)	49E0E 0N9VR C8MF7 2	17 Juli 2023	205.200.000
23	KM. Gunung Sari Sejati	Denda Administratif (Batang Tubuh)	A7B63 1JNFLU PHMVK	23 Juli 2023	4.386.000
24	PT. Indra Jaya Abadi	Denda Administratif (Batang Tubuh)	C3B3F 61QUQ TFSP9 K	14 Agustus 2023	116.750.000
25	PT. Rubelli Indonesia	Denda Administratif (Batang Tubuh)	8A834 8N3EA KM7LT L	21 Agustus 2023	42.104.000
26	CV. Firdali Sejahtera	Denda Administratif (Batang Tubuh)	1AD98 3CIFB6 ANDK7	15 Agustus 2023	1.140.000
27	PT. Berkah Bahari Mina Makmur	Denda Administratif (Batang Tubuh)	C31626 U8ELF TDO21	15 Agustus 2023	94.544.000
28	KM. Samudra Mandiri 301 PT. Samudera Marakiri	Denda Administratif (Batang Tubuh)	8189F0 N9VRF G7IB8	25 Agustus 2023	17.000.000
29	KM. Rani Jaya - II	Denda Administratif (Batang Tubuh)	8C5940 N9VRF G7IMG	25 Agustus 2023	30.000.000
30	KM. Rezeki Indah - II Bebyson Bong	Denda Administratif (Batang Tubuh)	F40844 8VV5P 1RIVC	25 Agustus 2023	8.000.000

31	KM. Serba Guna Budiyo	Denda Administratif (Batang Tubuh)	78CD9 6U8ELJ 7374N	26 September 2023	20.000.000
32	KM. Kilat Maju Jaya - 66	Denda Administratif (Batang Tubuh)	CA8DE 3CIFB9 K9LLB	25 September 2023	16.875.000
33	KM. Kilat Maju Jaya - 8	Denda Administratif (Batang Tubuh)	F52FB4 8VV5S 0MN86	25 September 2023	20.700.000
34	KM. Putri Tunggal - 6	Denda Administratif (Batang Tubuh)	99CF66 U8ELL LNPDV	9 Oktober 2023	8.000.000
35	PT. Sinarjaya Inti Mulya	Denda Administratif (Batang Tubuh)	61E451 JNFMA 65A09	6 November 2023	29.327.600
36	PT. Hamparan Laut Sejahtera	Denda Administratif (Batang Tubuh)	4852A 8N3EA TCGP2 9	7 November 2023	93.512.080
37	PT. Maju Mina Laut Indonesia	Denda Administratif (Batang Tubuh)	D30D6 2G4VG VVL1F Q	19 Desember 2023	17.100.000
38	PT. ARGO MINA SEMESTA	Denda Administratif (Batang Tubuh)	FCEBE 8N3EB 0MG1K N	19 Desember 2023	13.300.000
39	PT. Mitra Kartika Karya	Denda Administratif (Batang Tubuh)	AA258 61QUR 9KITRA	28 Desember 2023	103.355.959
TOTAL					2.842.442.279

B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara
Rp40.961.782
.363*

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp40.961.782.363 atau 99.14 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 41.039.008.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	12.068.447.000	11.964.332.129	99,14
Belanja Barang	27.581.569.000	27.563.524.531	99,14
Belanja Modal	1.388.992.000	1.388.925.703	99,93
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	41.039.008.000	40.916.782.363	99,70

*Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	11.964.332.129	11.005.586.772	8,71
Belanja Barang	27.563.524.531	18.340.396.089	50,29
Belanja Modal	1.388.925.703	5.158.758.099	(73,08)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	40.916.782.363	34.504.740.960	18,58

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai Rp
11.964.332.1
29*

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.964.332.129 dan Rp 11.005.586.772. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2022 karena terdapat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 11 orang, pegawai non PNS sebanyak 50 orang dan pegawai negeri sipil sebanyak 110 orang.

*Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	3.953.486.820	3.955.732.200	
Belanja Pembulatan Gaji PNS	58.962	60.741	
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	340.222.496	335.580.806	
Belanja Tunj. Anak PNS	109.177.426	104.531.564	
Belanja Tunj. Struktural PNS	29.520.000	28.980.000	
Belanja Tunj. Fungsional PNS	198.210.000	202.680.000	
Belanja Tunj. PPh PNS	4.032.153	4.500.318	
Belanja Tunj. Beras PNS	276.354.720	269.185.140	
Belanja Uang Makan PNS	427.116.000	460.173.000	
Belanja Tunjangan Umum PNS	107.440.000	108.020.000	
Belanja Gaji Pokok PPPK	320.266.000	0	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.838	0	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	22.444.400	0	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	7.390.130	0	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	30.700.000	0	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	25.564.260	0	-
Belanja Uang Makan PPPK	29.119.000	0	-
Beban Uang Lembur	532.776.000	598.676.000	
Beban Uang Lembur PPPK	40.949.000	0	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	5.045.141.934	4.937.467.003	
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja PPPK	464.353.990	0	
Jumlah Belanja Kotor	11.964.332.129	11.005.586.772	8,71

B.4 Belanja Barang

Belanja Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31
Barang Desember 2022 adalah masing-masing sebesar
Rp27.563.52 Rp27.563.524.531 dan Rp18.340.396.089 Realisasi Belanja
4.531 Barang 31 Desember 2023 nilai belanja barang mengalami
kenaika karena pada Triwulan III ada belanja barang
berupa pembelian radar senilai Rp.110.945.000 dan
General Overhaul KP. Hiu 10 senilai Rp189.048,651.

*Perbandingan Belanja Barang
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN)%
Belanja Barang Operasional	4.259.128.690	3.929.824.730	52%
Belanja Barang Non Operasional	11.891.083.122	7.737.633.553	61%
Belanja Jasa	1.628.985.764	1.148.393.134	59%
Belanja Pemeliharaan	5.531.467.209	2.569.070.097	68%
Belanja Persediaan	316.084.500	269.668.080	54%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.936.775.246	2.685.806.495	59%
Jumlah Belanja Kotor	27.563.524.531	18.340.396.089	60%

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp1.388.925.703 Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.388.925.703 dan Rp5.158.758.099 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada 2022 mengalami kenaikan disebabkan karena adanya pengadaan kapal speedboat hiu biru 03.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2023 dan 31 September 2022*

URAIAN	REALISASI 30 SEPTEMBER 2023	REALISASI 30 SEPTEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.199.877.052	4.014.224.889	23%
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	189.048.651	1.144.533.210	14%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.388.925.703	5.158.758.099	37%
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	1.388.925.703	5.158.758.099	100,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp0 Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp1.388.925.
703*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.388.925.703 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.158.758.099. Hal ini disebabkan karena pada periode tahun 2022 terdapat belanja pengadaan peralatan mesin berupa speed boat. Belanja modal peralatan dan mesin realisasi 31 Desember 2023 terdiri dari General Overhaul Auxiliary Engine KP. Hiu 10 senilai Rp189.048.651 dan pembelian senilai Rp1.199.877.052 yang terdiri dari sebagai berikut:

*Tabel Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d.
31 Desember 2023*

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
532111	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN		
	Mini Bus	1 Unit	333.750.000
	Sepeda Motor	1 Unit	18.428.652
	Rak Besi	16 Buah	37.438.400
	Kardex Besi	4 Buah	11.360.000
	Meja kerja Kayu	1 Buah	12.070.000
	Kursi Besi/Metal	1 Buah	7.370.000
	Sofa	1 Set	10.670.000
	Lemari Es	2 Buah	9.595.000
	Reach in Freezer	1 Buah	4.495.000
	Mesin Cuci	1 Buah	7.159.500
	A.C Split	3 Buah	23.590.000
	Televisi	2 Buah	14.760.000
	Laptop	16 Buah	278.970.000

	Stabilisator	2 Buah	71.695.000
	Coffee Maker	1 Buah	4.950.000
	Genset	1 Buah	216.650.000
	Radar Lainnya	1 Buah	110.945.000
	Tablet PC	2 Buah	25.980.000
TOTAL			1.199.877.052

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Belum terdapat belanja modal gedung bangunan sampai dengan periode 31 Desember 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja
Modal Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan Rp0*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0 tidak ada realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan 31 Desember 2023 dikarenakan sebagian besar Satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sudah memiliki jaringan telepon dan PDAM.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	100,00

*Belanja
Modal
Lainnya Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

UPT Pangkalan PSDKP Jakarta tidak memiliki belanja modal lainnya.

*Belanja
Penanganan
Covid-19 dan
Pemulihan
Ekonomi
Negara (PC-
PEN) Rp0*

B.6 Belanja Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Negara (PC-PEN)

Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Negara (PC-PEN) sudah tidak ada pada pangkalan psdkp jakarta.

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo UP	-	-
Kwitansi UP Belum SPJ	-	-
Jumlah Saldo UP	-	-
Saldo TUP	-	-
Kwitansi TUP Belum SPJ	-	-
Jumlah Saldo TUP	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C.4 Piutang PNB

Piutang PNB Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp 0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya.

C.5 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / TGR Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0
Rp0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih

C.8 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Piutang Bukan Pajak

*Piutang
Bukan Pajak
Rp0*

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

C.11 Persediaan

*Persediaan
Rp364.667.0
25*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp364.667.025 dan Rp282.359.936. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	102.080.531	145.494.536
Suku Cadang	262.586.494	136.865.400
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	364.667.025	282.359.936

Barang persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, merupakan pembelian dari barang konsumsi senilai Rp103.080.531 dan suku cadang senilai Rp262.586.494.

Rincian Mutasi Persediaan TA. 2023

RINCIAN MUTASI TRANSAKSI PERSEDIAAN		
Transaksi	NILAI	
SALDO AWAL PADA 1 Januari 2023		282.359.936
MUTASI TAMBAH		
TOTAL PEMBELIAN (pada aplikasi persediaan)	1.120.586.732	
TOTAL MUTASI TAMBAH		1.120.586.732
MUTASI KURANG		
Total Transfer Keluar (Aplikasi Persediaan)		
Pemakaian Barang Konsumsi	359.498.505	
Pemakaian Suku Cadang	678.781.138	
TOTAL MUTASI KURANG	-	1.038.279.643
SALDO AKHIR PADA 31 Desember 2023		364.667.025

Rincian Mutasi Suku Cadang TA. 2023

RINCIAN MUTASI TRANSAKSI SUKU CADANG		
Transaksi	NILAI	
SALDO AWAL PADA 1 Januari 2023		136.865.400
MUTASI TAMBAH		
TOTAL PEMBELIAN (pada aplikasi persediaan)	804.502.232	
TOTAL MUTASI TAMBAH		804.502.232
MUTASI KURANG		
Total Transfer Keluar (Aplikasi Persediaan)		
Pemakaian Suku Cadang	678.781.138	
TOTAL MUTASI KURANG	-	678.781.138

SALDO AKHIR PADA 31 Desember 2023		262.586.494
--	--	--------------------

Rincian Mutasi Barang Konsumsi TA. 2023

RINCIAN MUTASI TRANSAKSI BARANG KONSUMSI		
Transaksi	NILAI	
SALDO AWAL PADA 1 Januari 2023		145.494.536
MUTASI TAMBAH		
TOTAL PEMBELIAN (pada aplikasi persediaan)	316.084.500	
TOTAL MUTASI TAMBAH		316.084.500
MUTASI KURANG		
Pemakaian Barang Konsumsi	359.498.505	
TOTAL MUTASI KURANG	-	359.498.505
SALDO AKHIR PADA 31 Desember 2023		102.080.531

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka

Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0

Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp(185). Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang

C.14 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

TGR (Netto) Rp0

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C.15 Tanah

Tanah Rp71.342.761.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp71.342.761.000 dan Rp Rp71.612.538.900

Rincian Mutasi Aset Tanah TA. 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	71.612.538.900
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Mutasi kurang:	0
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	- 269.777.900
Saldo per 31 Desember 2023	71.342.761.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	71.342.761.000

Saldo awal terdiri dari Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Pangkalan PSDKP Jakarta yang terletak di Jl. Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara dengan luas 8.563 m² (Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi), nilai buku Rp 71.196.635.000,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang sampai saat ini sertifikat induknya masih atas nama Direktorat Jenderal Perikanan

Kementerian Pertanian dan sedang dalam proses pemecahan sertifikat dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 113 dan tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Satwas SDKP Pesawaran yang terletak di Kota Bandar Lampung dengan luas 83 m² (Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) dan nilai buku Rp 415.903.900,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 8 tanggal 12 Desember 2018.

Berdasarkan laporan penilaian dari KPKNL Bandar Lampung dengan Nomor LAP-0591/1/PRO-01/WKN.05/KNL.03/01.01.00/2021 tanggal 30 Desember 2021 Terdapat kesalahan pencatatan Barang Milik Negara dari Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dikoreksi menjadi perubahan nilai berkurang yang semula Rp415.903.900 menjadi Rp146.126.000 mengalami pengurangan nilai aset senilai Rp269.777.900 dan menambah aset Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen senilai 86.306.000.

C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan
dan Mesin
Rp36.145.11
8.653*

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp36.145.118.653 dan Rp41.082.183.764. terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.317.710.992 yang berasal dari pembelian peralatan dan mesin senilai Rp1.199.877.052 ditambah pengembangan melalui KDP general overhaul KP.HIU 10 senilai Rp189.045.052 dan mutasi tambah sebesar Rp928.785.289 berasal dari pembelian dan transfer masuk. Transfer masuk ke Pangkalan PSDKP Jakarta sampai dengan 31 Desember 2023 berupa:

1. Transfer masuk dari Direktorat POA dengan Nomor

BAST B.18608/PSDKP.2/PL.450/IX/2023 tanggal 29 September 2023 senilai 922.168.289 dikurangi nilai software komputer senilai Rp133.770.000 menjadi Rp788.398.289 berupa 59 unit peralatan dan mesin.

2. Transfer masuk dari Direktorat Penanganan Pelanggaran senilai Rp4.350.000 dengan nomor BAST B.4946/PSDKP.1/PL.450/IX/2023 tanggal 31 Juli 2023.
 3. Transfer masuk dari Sesditjen PSDKP dengan nomor BAST B.6238/PSDKP.1/PL.450/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dengan nilai Rp104.477.800 berupa 53 unit peralatan dan mesin;
 4. Transfer masuk dari Stasiun PSDKP Tarakan dengan nomor BAST B.2355/PSDKPSta.5/PL.750/XI/2023 tanggal 2 November 2023 dengan nilai Rp11.913.000 berupa 1 unit laptop Asus;
 5. Transfer masuk dari Pangkalan PSDKP Lampulo dengan nomor BAST B.1274/PSDKPLan.3/PL.750/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dengan nilai Rp19.547.000 berupa 1 unit Tablet PC Samsung Galaxu Tab S8 Ultra;
- Mutasi tambah Peralatan dan Mesin berasal dari pembelian senilai Rp1.199.877.052 dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan Pembelian Peralatan dan Mesin

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
532111	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN		
	Mini Bus	1 Unit	333.750.000
	Sepeda Motor	1 Unit	18.428.652
	Rak Besi	16 Buah	37.438.400
	Kardex Besi	4 Buah	11.360.000
	Meja kerja Kayu	1 Buah	12.070.000
	Kursi Besi/Metal	1 Buah	7.370.000
	Sofa	1 Set	10.670.000
	Lemari Es	2 Buah	9.595.000
	Reach in Freezer	1 Buah	4.495.000

	Mesin Cuci	1 Buah	7.159.500
	A.C Split	3 Buah	23.590.000
	Televisi	2 Buah	14.760.000
	Laptop	16 Buah	278.970.000
	Stabilisator	2 Buah	71.695.000
	Coffee Maker	1 Buah	4.950.000
	Genset	1 Buah	216.650.000
	Radar Lainnya	1 Buah	110.945.000
	Tablet PC	2 Buah	25.980.000
TOTAL			1.199.877.052

Mutasi kurang peralatan dan mesin sebesar Rp7.254.776.103 yang berasal dari hibah keluar senilai Rp792.989.100 berupa speedboat Dolphin 022 ke SMKN 1 Mundu dan penghentian aset dari penggunaan senilai Rp.6.461.787.0003.

Tabel Mutasi Perubahan Nilai Asset TA. 2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	41.082.183.764
Mutasi tambah:	2.317.710.992
Pembelian	1.199.877.052
Pengembangan Melalui KDP	189.048.651
Transfer masuk	928.785.289
Mutasi kurang:	7.254.776.103
Hibah keluar	792.989.100
Penghentian aset dari penggunaan	6.461.787.003
Saldo per 31 Desember 2023	36.145.118.653
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(28.783.922.917)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	7.361.195.736

Saldo nilai perolehan pada 31 Desember 2022 senilai Rp41.082.183.764 nilai ditambah mutasi tambah berupa pembelian peralatan dan mesin senilai Rp1.199.877.052, pengembangan melalui KDP General Overhaul Auxiliary Engine KP.Hiu 10 senilai Rp189.048.651 dan Transfer masuk sebanyak 5 BAST dengan nilai Rp928.785.289 dikurangi dengan nilai mutasi kurang yang terdiri dari hibah keluar senilai Rp792.989.100 penghentian aset dari penggunaan senilai Rp6.461.787.003 Sehingga saldo

belanja peralatan dan mesin pada 31 Desember 2023 senilai Rp36.145.118.653 dan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 senilai Rp(28.783.922.917) sehingga Nilai Buku dari aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp7.361.195.736

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 adalah Rp20.238.625.975 dan pada 31 Desember 2022 senilai Rp19.983.037.374 kenaikan nilai gedung bangunan berasal dari mutasi tambah senilai Rp474.834.304 yang terdiri dari:

1. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif senilai Rp169.282.601 berupapagar permanen NUP 6 dengan nomor surat keterangan perbaikan pencatatan barang milik negara nomor B.3231/PSDKPLAN.3/PL.110/IX/2023 tanggal 14 September 2023;
2. Laporan penilaian dari KPKNL Bandar Lampung dengan Nomor LAP-0591/1/PRO-01/WKN.05/KNL.03/01.01.00/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 penambahan aset Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen senilai 86.306.000 berupa Mess Satwas SDKP Pesawaran;
3. Koreksi pencatatan nilai bertambah senilai Rp219.245.701.

Mutasi kurang gedung dan bangunan berasal dari koreksi pencatatan senilai Rp219.245.701. berikut tabel rincian perubahan nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2023:

*Tabel Mutasi Perubahan Nilai Asset Gedung dan Bangunan
TA.2023*

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	19.983.037.374
Mutasi tambah:	474.834.302
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	169.282.601
Saldo Awal	86.306.000
Koreksi Pencatatan nilai bertambah	219.245.701
Mutasi kurang:	219.245.701
Koreksi Pencatatan	219.245.701
Saldo per 31 Desember 2023	20.238.625.975
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(2.536.531.763)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	17.702.094.212

Saldo nilai perolehan pada 31 Desember 2022 senilai Rp 19.983.037.374 terdapat mutasi tambah senilai Rp 474.834.302 sehingga saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp 20.238.625.975. Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp (2.536.531.763) sehingga nilai buku per 31 Desember 2023 senilai Rp 17.702.094.212.

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan,
Jaringan dan
Irigasi
Rp2.310.645.
569*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.310.645.569 dan Rp 2.310.645.569. Tidak terdapat kenaikan terhadap aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Mutasi pada pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel Mutasi Perubahan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan
31 Desember 2023*

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2.310.645.569
Mutasi tambah:	-
Pemasangan Jaringan PDAM	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian Aset	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	2.310.645.569
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(667.695.562)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.642.950.007

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 senilai (667.695.562) sehingga Nilai Buku dari aset tetap Jalan,

Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 senilai Rp.1.728.349.012.

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp323.649.040*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah Rp323.649.040 dan dan saldo aset tetap per 31 Desember 2022 Rp418.520.040. terdapat mutasi kurang berupa penghentian aset dari penggunaan senilai Rp94.871.000:

Tabel Mutasi Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya TA.2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	418.520.040
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	94.871.000
Penghentian Aset Dari Penggunaan	94.871.000
Saldo per 31 Desember 2023	323.649.040
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 senilai Rp0, dan mutasi kurang senilai Rp0 sehingga Nilai Buku dari Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp323.649.040

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp31.401.400*

Rincian transaksi atas mutasi BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta, senilai Rp 31.401.400 Penjelasan saldo KDP pada Pangkalan PSDKP Jakarta:

- Perencanaan Pembangunan gudang Satwas SDKP Pandeglang senilai Rp31.401.400. pembangunan belum dilanjutkan karena adanya refokusing dan direncanakan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2024.

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(31.988.150.242) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(31.988.150.242) dan Rp(37.193.254.394). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 Desember 2023*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	36.145.118.653	28.783.922.917	7.361.195.736
2	Gedung dan Bangunan	20.238.625.975	2.536.531.763	17.702.094.212
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.310.645.569	667.695.562	1.642.950.007
Akumulasi Penyusutan		58.694.390.197	31.988.150.242	26.706.239.955

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp0 Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0 Saldo Aset Lain-lain s.d periode pelaporan 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp171.834.601. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	171.834.601
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	6.556.658.003
Mutasi tambah:	6.556.658.003
Pencatatan Barang yang mau dihapuskan	6.728.492.604
Mutasi kurang:	6.728.492.604
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Mutasi tambah senilai Rp6.556.658.003 berupa reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dan mutasi kurang berasal dari usulan penghapusan Pencatatan barang yang mau dihapuskan senilai Rp6.728.492.604 dengan nomor surat usulan penghapusan B.2134/PSDKPLan.3/PL.110/VI/2023 pada tanggal 26 Juni 2023 dan B.3360/PSDKPLAN.3/PL.750/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp(20.739.447). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	3.586.308.051	0	3.586.308.051
Jumlah	3.586.308.051	0	3.586.308.051

Amortisasi dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN s.d periode pelaporan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang
kepada
Pihak Ketiga
Rp37.040.768*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga s.d periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp37.040.768 dan Rp55.628.336. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Utang yang
belum
ditagihkan
Rp0*

C.26 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan yaitu utang yang belum diterima tagihannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas Rp

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

98.731.677.62 adalah masing-masing sebesar Rp98.731.677.652 dan Rp98.622.899.407 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah *Rp2.842.442.279* sebesar Rp2.842.442.279 dan Rp508.032.960.
279

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
PNBP	2.842.442.279	508.032.960	559
Jumlah	2.842.442.279	508.032.960	559

Penerimaan negara bukan pajak berasal dari denda administratif bidang kelautan dan perikanan sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2023 terdapat 39 billing Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari jenis denda administratif lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA WAJIB BAYAR	JENIS PNBP	NTPN	TANGGAL BAYAR	SETORAN PER AKUN (Rp)
1	Agus Triantoro (KM. Barges)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	0A9C97QLUF GC5I06	14 Februari 2023	133.747.200
2	Casmito (KM. Luhur Barokah 1)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	303612 G4VG5 H20JE	31 Maret 2023	100.723.200
3	PT. Satya Trinadi Komira Perkasa	Denda Administratif (Batang Tubuh)	DA7C97QLUF M3LKF C	06 April 2023	326.762.000
4	PT. Rubelli Indonesi	Denda Administratif (Batang Tubuh)	533FD7QLUF M3LL4 U	06 April 2023	513.418.000
5	Koperasi Mina Rizki Abadi (KOMIRA)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	A92270N9VR 30DPL 2	06 April 2023	25.669.000
6	PT. Rukun Artha Sentosa	Denda Administratif (Batang Tubuh)	98A007QLUF M3M3 DQ	11 April 2023	51.413.380
7	PT. Mina Lana Sentosa	Denda Administratif (Batang Tubuh)	112E861QUQH AS108	11 April 2023	53.297.640

8	PT. Aceh Bahari Nusantara	Denda Administratif (Batang Tubuh)	9F5862 G4VG7 P8292	11 April 2023	38.223.560
9	KM. Langsung Jaya Maritim (Suryanto)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	D9EB1 3CIFAQ GCUCB	18 April 2023	12.810.560
10	PT. Tri Anugerah Pasifik (KM. Merpati VII)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	774981 JNFLM 1J361	02 Mei 2023	42.530.440
11	KM. Bintang Laju Lestari - 1 (ROBIN)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	7063A 2G4VG AKPUM C	08 Mei 2023	50.605.840
12	KM. Sumber Makmur (Ko Kim Hong)	Denda Administratif (Batang Tubuh)	C40285 5DF05 2LM01	13 Juni 2023	10.000.000
13	KM. Banyu Urip Makmur - 88 (GT.128) Eddy Karso	Denda Administratif (Batang Tubuh)	F56865 5DF05 5TCLP	15 Juni 2023	34.455.040
14	KM. Bintang Samudra Perkasa (GT.140) Wibowo Karso	Denda Administratif (Batang Tubuh)	1B148 1JNFLR K9EO3	15 Juni 2023	37.685.200
15	KM. Eka Jaya Makmur 9 (GT.196) PT. Eka Jaya International	Denda Administratif (Batang Tubuh)	89B40 2G4VG E0MN1 S	19 Juni 2023	52.759.280
16	KM. Suman Jaya Perkasa - XII (GT.157) PT. Suman Karya Persada	Denda Administratif (Batang Tubuh)	97F597 QLUFS B4TRI	20 Juni 2023	42.261.260
17	KM. Suman Jaya Perkasa - XI (GT.147) PT. Suman Karya Persada	Denda Administratif (Batang Tubuh)	E53214 8VV5IP GPT6	20 Juni 2023	39.569.460
18	KM. Cahaya Budi Makmur F-112(GT.238) PT. Cahaya Budi Makmur Indonesia	Denda Administratif (Batang Tubuh)	FE6363 CIFBOK QBIR	25 Juni 2023	51.951.740
19	KM. Cahaya Budi Express (GT.238) PT. Cahaya Budi Makmur	Denda Administratif (Batang Tubuh)	CA280 55DF0 5DKCR H	25 Juni 2023	64.064.840
20	PT. Cenhong Fisherindo	Denda Administratif (Batang Tubuh)	23FE01 JNFM1 4VO2J	01 Agustus 2023	212.800.000
21	PT. Berkah Bahari Mina Makmur	Denda Administratif (Batang Tubuh)	50B4C 7QLUF VBUEO K	18 Juli 2023	106.400.000

22	CV. Sumber Rejeki Jaya	Denda Administratif (Batang Tubuh)	49E0E0N9VR C8MF7 2	17 Juli 2023	205.200.000
23	KM. Gunung Sari Sejati	Denda Administratif (Batang Tubuh)	A7B63 1JNFLU PHMVK	23 Juli 2023	4.386.000
24	PT. Indra Jaya Abadi	Denda Administratif (Batang Tubuh)	C3B3F 61QUQ TFSP9 K	14 Agustus 2023	116.750.000
25	PT. Rubelli Indonesia	Denda Administratif (Batang Tubuh)	8A834 8N3EA KM7LT L	21 Agustus 2023	42.104.000
26	CV. Firdali Sejahtera	Denda Administratif (Batang Tubuh)	1AD98 3CIFB6 ANDK7	15 Agustus 2023	1.140.000
27	PT. Berkah Bahari Mina Makmur	Denda Administratif (Batang Tubuh)	C31626 U8ELF TDO21	15 Agustus 2023	94.544.000
28	KM. Samudra Mandiri 301 PT. Samudera Marakiri	Denda Administratif (Batang Tubuh)	8189F0 N9VRF G7IB8	25 Agustus 2023	17.000.000
29	KM. Rani Jaya - II	Denda Administratif (Batang Tubuh)	8C5940 N9VRF G7IMG	25 Agustus 2023	30.000.000
30	KM. Rezeki Indah - II Bebyson Bong	Denda Administratif (Batang Tubuh)	F40844 8VV5P 1RIVC	25 Agustus 2023	8.000.000
31	KM. Serba Guna Budiyanto	Denda Administratif (Batang Tubuh)	78CD9 6U8ELJ 7374N	26 September 2023	20.000.000
32	KM. Kilat Maju Jaya - 66	Denda Administratif (Batang Tubuh)	CA8DE 3CIFB9 K9LLB	25 September 2023	16.875.000
33	KM. Kilat Maju Jaya - 8	Denda Administratif (Batang Tubuh)	F52FB4 8VV5S 0MN86	25 September 2023	20.700.000
34	KM. Putri Tunggal - 6	Denda Administratif (Batang Tubuh)	99CF66 U8ELL LNPDV	9 Oktober 2023	8.000.000

35	PT. Sinarjaya Inti Mulya	Denda Administratif (Batang Tubuh)	61E451 JNFMA 65A09	6 November 2023	29.327.600
36	PT. Hamparan Laut Sejahtera	Denda Administratif (Batang Tubuh)	4852A 8N3EA TCGP2 9	7 November 2023	93.512.080
37	PT. Maju Mina Laut Indonesia	Denda Administratif (Batang Tubuh)	D30D6 2G4VG VVL1F Q	19 Desember 2023	17.100.000
38	PT. ARGO MINA SEMESTA	Denda Administratif (Batang Tubuh)	FCEBE 8N3EB 0MG1K N	19 Desember 2023	13.300.000
39	PT. Mitra Kartika Karya	Denda Administratif (Batang Tubuh)	AA258 61QUR 9KITRA	28 Desember 2023	103.355.959
TOTAL					2.842.442.279

D.2 Beban Pegawai

*Beban
Pegawai
Rp11.964.332
.129*

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.964.332.129 dan Rp11.004.005.022. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pada tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan karena terdapat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 24 orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebanyak 28 orang, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan 15 Orang dan pegawai negeri sipil sebanyak 86 orang.

Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.953.849.020	3.956.233.800	49,98
Beban Pembulatan Gaji PNS	59.188	61.508	49,04
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	340.258.716	335.630.966	50,34
Beban Tunj. Anak PNS	109.191.914	104.541.596	51,09
Beban Tunj. Struktural PNS	29.520.000	28.980.000	50,46
Beban Tunj. Fungsional PNS	198.210.000	202.680.000	49,44
Beban Tunj. PPh PNS	4.032.153	4.500.318	47,26
Beban Tunj. Beras PNS	276.354.720	269.185.140	50,66
Beban Uang Makan PNS	427.116.000	458.591.250	48,22
Beban Tunjangan Umum PNS	107.440.000	108.020.000	49,87
Beban Uang Lembur	532.776.000	598.676.000	47,09
Beban Uang Lembur PPPK	40.949.000		
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	5.055.673.834	4.937.467.003	50,59
Beban Gaji Pokok PPPK	320.266.000	0	100,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	8.838	0	100,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	22.444.400	0	100,00
Beban Tunjangan Anak PPPK	7.390.130	0	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	30.700.000	0	100,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	25.564.260	0	100,00
Beban Uang Makan PPPK	29.119.000	0	100,00
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	464.353.990	0	100,00
Jumlah Beban Kotor	11.975.277.163	11.004.567.581	52,11
Pengembalian Beban Pegawai	(10.945.034)	(562.559)	95,11
Jumlah Beban	11.964.332.129	11.004.005.022	52,09

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp359.498.505*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp359.498.505 dan Rp280.304.010. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	'31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	359.498.505	280.304.010	56,19
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	0,00
Jumlah	359.498.505	280.304.010	56,19

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp17.760.61
0.008*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.760.610.008 dan Rp 12.832.940.761. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK/ TURUN (%)
Beban Keperluan Perkantoran	3.498.495.085	3.456.093.399	50,3
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	265.337.700	277.649.561	48,9
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.357.540	4.829.338	52,6
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	189.840.000	187.368.000	50,3
Beban Barang Operasional Lainnya	300.098.365	3.884.432	98,7
Beban Bahan	10.689.009.165	6.879.762.283	
Beban Honor Output Kegiatan	12.090.000	13.170.000	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.189.983.957	844.701.270	
Beban Langganan Listrik	779.094.479	551.331.154	
Beban Langganan Telepon	222.612.258	207.267.554	
Beban Langganan Air	46.075.335	34.786.793	
Beban Sewa	194.455.465	157.285.000	
Beban Jasa Profesi	119.900.000	78.000.000	
Beban Jasa Lainnya	248.260.659	136.811.977	64,5
JUMLAH	17.760.610.008	12.832.940.761	58,1

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.405.746.115 dan 2.776.833.297. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	926.658.900	369.313.739	71,50
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.331.835.567	1.803.549.383	64,88
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	38.469.910	38.304.400	50,11
Beban Pemeliharaan Jaringan	430.000.600	0	100,00
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Suku Cadang	678.781.138	565.665.775	54,54
Jumlah	5.405.746.115	2.776.833.297	94,67

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.936.775.246 dan Rp2.685.806.495. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh tingginya indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pangkalan PSDKP Jakarta dan Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	3.153.172.769	2.324.347.548	57,57
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	437.970.000	232.500.000	65,32
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	345.632.477,	128.958.947	72,83
Jumlah	3.936.775.246	2.685.806.495	59,44

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp1.059.766.
889*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.059.766.889 dan Rp3.654.285.098. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak

berwujud.

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	807.504.663	3.136.246.192	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	207.574.630	414.533.963	
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	26.870.159	67.870.070	
Beban Penyusutan Jaringan	15.829.343	31.658.685	
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	1.988.094	3.976.188	
Jumlah	1.059.766.889	3.654.285.098	(71,00)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

D.11 Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(117.587.318)*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing – masing senilai Rp(117.587.318) dan Rp(94.645.487) Defisit pelepasan aset non lancar senilai Rp(117.587.318), Pendapatan pelepasan aset non lancar senilai Rp42.889.664 dan dari beban pelepasan aset

non lancar senilai Rp160.476.982 dan pendapatan kegiatan non operasional lainnya senilai Rp0.

*Rincian (Defisit) Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	- 117.587.318	- 95.658.676	23
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	42.889.664	2.694.444	1.492
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	160.476.982	98.353.120	63
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.013.189	- 100
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	- 117.587.318	- 94.645.487	24

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

D.12 Pos Luar Biasa

*Pos Luar
Biasa Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

D.13. Surplus/Defisit – LO

*Surplus/
Defisit – LO
Rp(37.761.87
3.931)*

Surplus/ defisit – LO pada 31 Desember 2023 senilai Rp (37.761.873.931) dan pada 31 Desember 2022 senilai Rp (32.820.787.210)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp98.622.899.407

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp98.622.899.407 dan Rp97.423.865.015.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus(Defisit) LO
Rp(37.761.873.931)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(37.761.873.931) dan Rp(32.820.787.210). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas
Rp(190.485.252)

Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas pada 31 Desember 2023 senilai Rp(190.485.252) dan pada 31 Desember 2022 senilai Rp(40.399.815).

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0 Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Aset Tetap. Koreksi atas reklasifikasi aset tetap berupa lemari penyimpanan menjadi lemari besi.

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0 Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp(190.485.252) Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(190.485.252) dan Rp(40.400.000). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Lain Rp0 Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp38.061.13 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp38.061.137.428 dan Rp34.060.221.417.

7.428

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain Rp0

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar Rp0

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pada Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta tidak terdapat transfer keluar maupun transfer masuk.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung Rp0

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0-. dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

E.5 Kenaikan/ Penurunan Ekuitas

*Kenaikan/Pe
nurunan
Ekuitas
Rp108.778.2
45*

Kenaikan atau penurunan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp108.778.245 dan pada tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp1.199.034.392

E.6 Ekuitas Akhir

*Ekuitas
Akhir
Rp98.731.67
7.652*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp98.731.677.652 dan Rp98.622.899.407

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting yang mengakibatkan *force majeure* bagi UPT Pangkalan PSDKP Jakarta yang terjadi setelah tanggal Neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Struktur pejabat perbendaharaan Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta, terdiri dari:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Akhmadon, S.Pi., M.M
Pejabat Pembuat Komitmen	: Rahman Hakim Purnama, S.Pi, M.Si
Pejabat Penguji & Penandatanganan SPM	: Indra Adi Wibisono, S.Pi
Bendahara Pengeluaran	: Gugun Gunawan, S.Pi, M.Si
Bendahara Penerimaan	: Arini Mandhasia, S.Pi

Pada tahun anggaran 2023, Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor SP DIPA- 032.05.2.440816/2023 tanggal 30 November 2022 kode Digital Stamp 0746-4368-9190-0184 dengan total pagu anggaran senilai Rp 41.271.121.000 (Empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah). Selama waktu berjalan hingga periode pelaporan 31 Desember 2023, Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta, telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta telah melakukan revisi DIPA sebanyak 5 (lima) kali. Berikut daftar revisi Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta:

1. Revisi ke 1 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi ini diajukan untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor: B. 6142/PSDKP.1/RC.420/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022, perihal Perubahan Automatic Adjustment Ditjen PSDKP Tahun 2023. Adapun nilai anggaran yang dilakukan Automatic Adjustment sebesar Rp 1.843.324.000. Revisi anggaran disahkan melalui surat nomor: S-1014/AG/AG.3/2022, tanggal 27 Desember 2022.
2. Revisi ke 2 merupakan revisi yang diajukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi

anggaran berupa perubahan rencana penarikan dana (Perubahan halaman III DIPA) yang diajukan melalui surat usulan revisi anggaran Nomor: B.416/PSDKPLAN.3/RC.420/II/2023, tanggal 13 Februari 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-995/WPB.12/2023 , tanggal 14 Februari 2023.

3. Revisi ke 3 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi anggaran berupa penghapusan atau buka blokir anggaran, khususnya anggaran pengadaan kendaraan dinas fungsional roda 4 dan roda 2. Usulan revisi anggaran diajukan melalui surat nomor: B.64/DJPSDKP/RC.420/II/2023, tanggal 6 Februari 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-85/AG/AG.3/2023, tanggal 21 Februari 2023.
4. Revisi ke 4 merupakan revisi yang diajukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi anggaran berupa perubahan rencana penarikan dana (Perubahan halaman III DIPA) yang diajukan melalui surat usulan revisi anggaran Nomor: B.1171 /PSDKPLAN.3/RC.420/IV/2023, tanggal 11 April 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-2405/WPB.12/2023, tanggal 12 April 2023.
5. Revisi ke 5 merupakan revisi yang diajukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi anggaran berupa perubahan rencana penarikan dana (Perubahan halaman III DIPA) yang diajukan melalui surat usulan revisi anggaran Nomor: B.2237/PSDKPLAN.3/RC.420/VII/2023, tanggal 4 Juli 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-3959/WPB.12/2023 , tanggal 6 Juli 2023.
6. Revisi 6 merupakan revisi anggaran yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Revisi ini dilakukan dengan mekanisme revisi anggaran antar KRO, dimana terjadi pengurangan anggaran pada KRO 2350.RCG (Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup) sebesar Rp

52.780.000 untuk dilakukan pergeseran anggaran ke KRO 2350.QDD (Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat). Revisi ini juga sekaligus menghilangkan anggaran yang sudah terblokir pada KRO 2350.RCG (Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup) sebesar Rp 443.324.000 dari pagu Satker Pangkalan PSDKP Jakarta. Usulan revisi anggaran diajukan melalui surat nomor: B.681/DJPSDKP/RC.420/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-392/AG/AG.3/2023, tanggal 18 Juli 2023.

7. Revisi ke 7 merupakan revisi yang diajukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi anggaran berupa perubahan rencana penarikan dana (Perubahan halaman III DIPA) yang diajukan melalui surat usulan revisi anggaran Nomor: B.2763/PSDKPLAN.3/RC.420/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-5289/WPB.12/2023, tanggal 16 Agustus 2023.
8. Revisi 8 merupakan revisi yang diajukan ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran (Dit PA). Revisi anggaran berupa penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 739.191.000 yang digunakan untuk mengakomodir penggajian pegawai PPPK tahun anggaran 2023. Revisi diajukan melalui surat nomor: B.789/DJPSDKP/RC.420/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-284/PB.2/2023, tanggal 29 Agustus 2023.
9. Revisi 9 merupakan revisi yang diajukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Revisi anggaran berupa perubahan rencana penarikan dana (Perubahan halaman III DIPA) yang diajukan melalui surat usulan revisi anggaran Nomor: B.3120/PSDKPLAN.3/RC.420/ IX/2023, tanggal 06 September 2023 dan disahkan melalui surat nomor: S-5562/WPB.12/2023, tanggal 7 September 2023.

Pengurangan anggaran semula-menjadi UPT Pangkalan PSDKP Jakarta
TA.2023

URAIAN	DIPA 2023	
	DIPA	DIPA
	SEMULA / AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.485.847.000	1.485.847.000
		-
Jumlah Pendapatan	1.485.847.000	1.485.847.000
Belanja		
Belanja Pegawai	11.885.091.000	12.624.282.000
Belanja Barang	27.810.223.000	27.776.899.000
Belanja Modal	1.575.807.000	1.165.807.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	41.271.121.000	41.566.988.000

Terdapat beberapa Pengembalian Belanja, antara lain:

1. Akun 815511 berupa Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Sisa TUP Pangkalan PSDKP Jakarta senilai Rp 425.217.600 dengan nomor NTPN D3F6A0JSRC709JCO dan nomor billing 700230228299160 dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2023.
2. Akun 511122 berupa pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS senilai Rp14.488 dengan nomor NTPN B76752CNR1EP4EK6 dan nomor billing 700230328990342 dibayarkan pada tanggal 28 Maret 2023
3. Akun 511111 berupa pengembalian belanja Tunj. Suami/Istri PNS senilai Rp362.200 dengan nomor NTPN B76752CNR1EP4EK6 dan nomor billing 700230328990342 dibayarkan pada tanggal 28 Maret 2023
4. Akun 511121 berupa pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS senilai Rp36.220 dengan nomor NTPN B76752CNR1EP4EK6 dan nomor billing 700230328990342 dibayarkan pada tanggal 28 Maret 2023
5. Akun 815511 berupa penerimaan pengembalian tambahan uang persediaan TUP Pangkalan PSDKP Jakarta senilai Rp425.217.600 dengan nomor NTPN D3F6A0JSRC709JCO dan nomr kode billing

700230228299160 dibayarkan tanggal 28 Februari 2023.

6. Akun 815511 berupa Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Sisa TUP Pangkalan PSDKP Jakarta senilai Rp65.105.208 dengan nomor NTPN 23C930JSRCCHF1RG dan nomor billing 700230414075760 dibayarkan pada tanggal 14 April 2023.
7. Akun 815511 berupa Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Sisa TUP Pangkalan PSDKP Jakarta senilai Rp271.880 dengan nomor NTPN 23BC62CNR1N378BS dan nomor billing 700230608003452 dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2023
8. Akun 815511 berupa Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Sisa TUP Pangkalan PSDKP Jakarta senilai Rp99.546.443 dengan nomor NTPN 3C0766QRA6MB3AUB dan nomor billing 700230718991307 dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2023

Terdapat Penerimaan negara bukan pajak berasal dari denda administratif bidang kelautan dan perikanan sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2023 terdapat 33 billing Penerimaan negara bukan pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor & Tanggal Penetapan	Wajib Bayar	Jenis PNB	NTPN	Nilai
1	B81/DJPSDKP/PW.150/II/2023 14 Februari 2023	Agus Triantoro (KM. Barges)	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0A9C97Q LUGFC5I 06	133.747.200
2	B.217/DJPSDKP/PW.150/III/2023 31 Maret 2023	Casmito (KM. Luhur Barokah 1)	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	303612G 4VG5H20 JE	100.723.200
3	B.285/DJPSDKP/PW.110/IV/2023 5 April 2023	PT. Satya Trinadi Komira Perkasa	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	DA7C97Q LUFM3LK FC	326.762.000
4	B.286/DJPSDKP/PW.110/IV/2023 5 April 2023	PT. Rubelli Indonesi	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	533FD7Q LUFM3LL 4U	513.418.000
5	B.287/DJPSDKP/PW.110/IV/2023 5 April 2023	Koperasi Mina Rizki Abadi (KOMIRA)	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	A92270N 9VR30DP L2	25.669.000
6	B.278/DJPSDKP/PW.110/IV/2023 6 April 2023	PT. Rukun Artha Sentosa	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	98A007Q LUFM3M 3DQ	51.413.380
7	B.279/DJPSDKP/PW	PT. Mina Lana	425839 -	112E861	53.297.640

	.110/IV/2023 6 April 2023	Sentosa	Pendapatan Lainnya	Denda -	QUQHAS 108	
8	B.280/DJPSDKP/PW .110/IV/2023 6 April 2023	PT. Aceh Bahari Nusantara	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda -	9F5862G 4VG7P82 92	38.223.560
9	B.351/DJPSDKP/PW .110/IV/2023 17 April 2023	KM. Langsung Jaya Maritim (Suryanto)	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda -	D9EB13C IFAQGC CB	12.810.560
10	B.352/DJPSDKP/PW .110/IV/2023 17 April 2023	PT. Tri Anugerah Pasifik (KM. Merpati VII)	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda -	774981JN FLM1J36 1	42.530.440
11	B.350/DJPSDKP/PW .110/IV/2023 17 April 2023	KM. Bintang Laju Lestari - 1 (ROBIN)	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda -	7063A2G 4VGAKPU MC	50.605.840
12	B.459/DJPSDKP/PW .430/VI/2023 12 September 2023	KM. Sumber Makmur (Ko Kim Hong)	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda -	C402855 DF052LM 01	10.000.000
13	B.499/DJPSDKP/PW .430/VI/2023 14 September 2023	KM. Banyu Urip Makmur - 88 (GT.128) Eddy Karso	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda -	F568655 DF055TC LP	34.455.040
14	B.500/DJPSDKP/PW .430/VI/2023 14 September 2023	KM. Bintang Samudra Perkasa (GT.140) Wibowo Karso	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda -	1B1481J NFLRK9E 03	37.685.200
15	B.501/DJPSDKP/PW .430/VI/2023 14 September 2023	KM. Eka Jaya Makmur 9 (GT.196) PT. Eka Jaya International	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda -	89B402G 4VGE0M N1S	52.759.280
16	B.502/DJPSDKP/PW .430/VI/2023 14 September 2023	KM. Suman Jaya Perkasa - XII (GT.157) PT. Suman Karya Persada	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda -	97F597Q LUFBS4T RI	42.261.260
17	B.504/DJPSDKP/PW .430/VI/2023 14 September 2023	KM. Suman Jaya Perkasa - XI (GT.147) PT. Suman Karya Persada	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda -	E532148 VV5IPGP T6	39.569.460
18	B.503/DJPSDKP/PW .430/VI/2023 14 September 2023	KM. Cahaya Budi Makmur F-112(GT.238) PT. Cahaya 9Budi Makmur Indonesia	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda -	FE6363CI FB0KQBI R	51.951.740
19	B.505/DJPSDKP/PW .430/VI/2023 14 September 2023	KM. Cahaya Budi Express (GT.238) PT. Cahaya Budi Makmur	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda -	CA28055 DF05DKC RH	64.064.840
20	B.678/DJPSDKP/PW .140/VII/2023 10 Juli 2023	PT. Cenhong Fisherindo	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda -	23FE01J NFM14V 02J	212.800.000

21	B.679/DJPSDKP/PW .140/VII/2023 10 Juli 2023	PT. Berkah Bahari Mina Makmur	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	50B4C7Q LUFVBUE OK	106.400.000
22	B.680/DJPSDKP/PW .140/VII/2023 10 Juli 2023	CV. Sumber Rejeki Jaya	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	49E0E0N 9VRC8MF 72	205.200.000
23	B.709/DJPSDKP/PW .110/VII/2023 21 Juli 2023	KM. Gunung Sari Sejati	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	A7B631J NFLUPH MVK	4.386.000
24	B.743/DJPSDKP/PW .110/VIII/2023 4 Agustus 2023	PT. Indra Jaya Abadi	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	C3B3F61 QUQTFSP 9K	116.750.000
25	B.766/DJPSDKP/PW .140/VIII/2023 8 Agustus 2023	PT. Rubelli Indonesia	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	8A8348N 3EAKM7L TL	42.104.000
26	B.767/DJPSDKP/PW .140/VIII/2023 8 Agustus 2023	CV. Firdali Sejahtera	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	1AD983C IFB6AND K7	1.140.000
27	B.768/DJPSDKP/PW .140/VIII/2023 8 Agustus 2023	PT. Berkah Bahari Mina Makmur	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	C31626U 8ELFTDO 21	94.544.000
28	B.803/DJPSDKP/PW .110/VIII/2023 23 Agustus 2023	KM. Samudra Mandiri 301 PT. Samudera Marakiri	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	8189F0N 9VRFG7I B8	17.000.000
29	B.804/DJPSDKP/PW .110/VIII/2023 23 Agustus 2023	KM. Rani Jaya - II	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	8C5940N 9VRFG7I MG	30.000.000
30	B.805/DJPSDKP/PW .110/VIII/2023 23 Agustus 2023	KM. Rezeki Indah - II Bebysong Bong	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	F408448 VV5P1RI VC	8.000.000
31	B.895/DJPSDKP/PW .110/IX/2023 23 Agustus 2023	KM. Serba Guna Budiyanto	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	78CD96U 8ELJ7374 N	20.000.000
32	B.901/DJPSDKP/PW .110/IX/2023 22 September 2023	KM. Kilat Maju Jaya - 66	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	CA8DE3C IFB9K9LL B	16.875.000
33	B.902/DJPSDKP/PW .110/IX/2023 22 September 2023	KM. Kilat Maju Jaya - 8	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	F52FB48 VV5S0MN 86	20.700.000
34	B.9064/DJPSDKP/P W.340/X/2023 04 Oktober 2023	KM. Putri Tunggal - 6	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	99CF66U 8ELLNP DV	8.000.000
35	B.1688/PSDKP.5/KU .340/XI/2023 3 November 2023	PT. Sinarjaya Inti Mulya	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	61E451J NFMA65 AO9	29.327.600
36	B.1052/DJPSDKP/P W.210/XI/2023 7 November 2023	PT. Hamparan Laut Sejahtera	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	4852A8N 3EATCGP 29	93.512.080
37	B.1181/DJPSDKP/P W.110/XII/2023 18 Desember 2023	PT. Maju Mina Laut Indonesia	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	D30D62G 4VGVL1 FQ	17.100.000
38	B.1182/DJPSDKP/P W.110/XII/2023 18 Desember 2023	PT. ARGO MINA SEMESTA	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	FCEBE8N 3EB0MG1 KN	13.300.000
39	B.1198/DJPSDKP/P W.110/XII/2023 22 Desember 2023	PT. Mitra Kartika Karya	425839 Pendapatan Lainnya	- Denda	AA25861 QUR9KIT RA	103.355.959
TOTAL						2.842.442.279

9. Terdapat usulan Penetapan Status Penggunaan Senilai Rp45.245.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan nomor usulan PSP B.2157/PSDKPLan.3/PL.710/VII/2023 tanggal 27 September 2023.
10. Hibah barang milik negara berupa 1 (satu) unit speed boat/ motor tempel dengan nilai perolehan sebesar Rp792.989.100 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mundu Cirebon dengan nomor perjanjian hibah 001/PSDKPLAN.3/PL.750/V/2023 dan 425/217/SMKNI-CASIDIKWIL.X Tanggal 16 Mei 2023 dan surat keputusan menteri kelautan dan perikanan Nomor 411/KEPMEN-KP.SJ/PL.750/2023.
11. Usulan Penghapusan BMN dengan nomor surat B.2134/PSDKPLAN.3/PL.110/VI/2023 sebanyak 989 NUP dengan nilai Rp3.427.989.050 berupa peralatan dan mesin yang berada di Satwas SDKP Sukabumi.
12. Temuan hasil audit Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Hasil Analisis SPKP Tidak Sesuai SOP Tahapan Klarifikasi Terhadap Dugaan Pelanggaran Kapal atas Analisis SPKP TA 2023 Tidak Tepat Waktu Penetapan Sanksi Administratif Tidak Didukung Rekomendasi Dari Tim Pengenaan Sanksi Monitoring atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Belum Optimal Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) tidak Tertib.
13. Lelang satu paket barang inventaris kantor dengan keadaan rusak berat dan kondisi apa adanya senilai Rp9.700.777 kepada Samah NIK 3171031705700016 dengan nomor Risalah Lelang 817/26/2023 tanggal 28 September 2023. Bukti Penerimaan Negara dengan nomor NTPN DE7E30N9VRI9LA9I.
14. Sisa BBM Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta KP.

HIU 06 dan KP. HIU 10 per tanggal 29 Desember 2024 sebagai berikut:

Sisa BBM Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	Kapal Pengawas	Jumlah BBM (L)	Harga satuan BBM	Total
1	HIU 06	6.900	21.518	148.474.200
2	HIU 10	4.000	21.518	86.072.000